

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERBASIS ITIKAD BAIK



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**SHABILLA MAHADI
C100170004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE BERBASIS ITIKAD BAIK**

PUBLIKASI ILMIAH

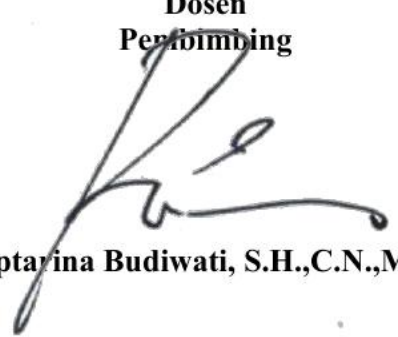
Oleh :

SHABILLA MAHADI

C100170004

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

**Dosen
Pembimbing**


(Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERBASIS ITIKAD BAIK

OLEH

SHABILLA MAHADI

C100170004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 4 Februari 2021

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati, S.H.,C.N.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,PhD.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andrea Luhur Prakosa, S.H.,M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan



(Prof. Dr. H. KhudzaifahDimyati, S.H.,M.H.)

NIK. 537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Januari 2021

Penulis



SHABILLA MAHADI

C100170004

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERBASIS ITIKAD BAIK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sahnya perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dan itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian sahnya perjanjian jual beli dalam transaksi *e-commerce* dan itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce* berpedoman KUHPerdota dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesimpulan dari penelitian syarat sah suatu perjanjian yaitu wajib terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan hak serta kewajiban para pihak telah dilaksanakan dengan itikad baik dalam bertransaksi melalui *e-commerce*. Hambatan yang dialami ialah sulit mengetahui apakah para pihak sudah cakap hukum atau belum, tidak mengetahui keadaan objek secara jelas.

Kata Kunci : perjanjian, jual beli, e-commerce, itikad baik

Abstract

This study aims to determine the validity of the sale and purchase agreement in e-commerce transactions and the good faith of the parties in transacting through e-commerce. The research method used is the normative legal research method. The type of research used is descriptive legal research. From the results of the research the validity of the sale and purchase agreement in e-commerce transactions and the good faith of the parties in transacting through e-commerce based on the Civil Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The conclusion from the research on the legal requirements of an agreement is that the provisions in Article 1320 of the Civil Code are mandatory and the rights and obligations of the parties have been carried out in good faith in transacting through e-commerce. The obstacle experienced is that it is difficult to know whether the parties are legally competent or not, not knowing the state of the object clearly.

Keywords: agreement, sale and purchase, e-commerce, good faith

1. PENDAHULUAN

Peraturan hukum perjanjian yang dipakai Indonesia merupakan ketentuan yang bersumber pada buku ketiga (KUHPerdota) mengenai Perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota dinyatakan perikatan muncul dari perjanjian serta UU, dengan demikian perjanjian serta UU itu adalah sumber dari perikatan.

Sedangkan Perjanjian itu ketentuannya ada di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

“Perjanjian merupakan tindakan dimana satu pihak ataupun lebih mengikatkan diri kepada satu pihak lain ataupun lebih”.

Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan jual beli merupakan persetujuan dimana orang yang satu mengikatkan diri guna memberikan kebendaan serta seseorang yang lain guna melunasi harga yang sudah dijanjikan. Esensi dari definisi tersebut penyerahan benda dan pembayaran harga. Yahya Harahap menjelaskan bahwa : Suatu Perjanjian memiliki definisi “Perbuatan hukum mengenai harta kebendaan diantara dua orang ataupun lebih, yang menimbulkan suatu hak terhadap salah satu orang guna mendapatkan suatu prestasi serta memberikan kewajiban kepada pihak lain guna menunaikan prestasi.

Asas yang menjadi landasan hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Sesuai isi pasal 1338 *jo.* pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku terhadap setiap orang yang membuatnya serta telah mengikat para pihak. Dengan adanya hal itu, pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian diperbolehkan guna membuat kesepakatan yang dapat menciptakan kewajiban apapun, selama prestasi yang harus dilaksanakan itu, tidak melanggar ketentuan didalam Undang-undang. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Itikad baik disaat membuat suatu perjanjian diartikan sebagai kejujuran. Seseorang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi yaitu internet merupakan sebuah koneksi antar jaringan komputer. Internet yaitu media informasi serta komunikasi elektronik sudah banyak dimanfaatkan guna berbagai aktivitas, diantaranya guna menjelajah (*browsing*), komunikasi melalui situs jaringan sosial, melakukan kirim pesan melalui email, mencari data maupun berita, serta dapat juga melakukan perdagangan melalui media internet. Peristiwa perdagangan menggunakan koneksi internet sering disebut *electronic commerce*, ataupun biasa disebut *online*.

Tujuan utama adanya perkembangan teknologi yaitu mempermudah aktifitas serta kegiatan manusia. Keberadaan internet merupakan salah satu perkembangan dalam

bidang teknologi yang berkembang sangat maju serta memiliki beberapa aspek, diantaranya yaitu pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan menggunakan transaksi perdagangan. Perkembangan keberadaan internet merubah konsep perdagangan dimana proses jual beli bisa dilaksanakan diantara penjual serta pembeli tanpa bertatap muka dengan langsung antara kedua belah pihak.

Perkembangan internet yang makin maju adalah salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Perkembangan e-commerce ketentuannya berada pada UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa dikenal UU ITE. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana ketentuan peraturannya ada di KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* itu sendiri pada intinya adalah suatu jenis perdagangan yang sering dikatakan sebagai perdagangan modern yang menggunakan suatu teknologi seperti jaringan internet sebagai media dalam menjalankan perdagangan. Suatu kehendak antara pelaku usaha dan konsumen yang diwujudkan melalui kesepakatan adalah suatu dasar mengikatnya kontrak, suatu kehendak tersebut bisa dituangkan dengan beberapa cara baik secara lisan maupun secara tertulis serta mengikat pelaku usaha dan konsumen dengan semua akibat hukumnya.

Transaksi jual beli dengan internet, sering timbul adanya kecurangan. Kecurangan itu menyangkut keberadaan objek yang dipesan, harga barang, pelaku usaha serta pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Salah satu kecurangan yang menyangkut pihak penjual, meliputi pihak penjual yang bersangkutan adalah toko yang fiktif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sahnya perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce perpektif hukum perdata dan bagaimana itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui e-commerce ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sahnya perjanjian jual-beli dalam transaksi e-commerce perspektif hukum perdata dan untuk mengetahui itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui e-commerce. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum perdata terkait sahnya perjanjian jual-beli dalam transaksi e-commerce perspektif hukum perdata serta memberikan pengetahuan mengenai itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui e-commerce.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka ataupun data sekunder belaka. Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan pendekatan doktrinal, sebab berdasarkan penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai aturan tertulis yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga ataupun pejabat negara yang memiliki hak, maka dari itu pengkajian yang dilaksanakan terbatas oleh perundang-undangan yang berhubungan terhadap objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Perdata

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yaitu tindakan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih. Dalam perjanjian memerlukan syarat-syarat sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi, Sepakat mereka yang mengikatkan diri yakni mereka yang membuat suatu perjanjian sudah setuju terkait suatu hal pokok yang diperjanjikan. Sepakat yaitu persesuaian paham serta kehendak diantara pelaku usaha dan konsumen. Terhadap sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang satu, merupakan yang dikehendaki oleh orang lain. Terhadap diperlakukannya kata sepakat melakukan perjanjian, maka penjual dan pembeli memiliki kebebasan kehendak. Dalam ketentuan pasal 1320 ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Dalam suatu perjanjian terdapat asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat maka sudah sah serta mengikat secara penuh terhadap setiap orang yang membuat nya. Pelaku usaha dan konsumen tidak memperoleh tekanan yang menimbulkan terjadinya cacat terhadap perwujudan kehendak itu. Kesepakatan tidak dapat dianggap jika kesepakatan disebabkan paksaan baik dari orang dalam perjanjian tersebut ataupun orang di luar yang berkepentingan dalam perjanjian itu.

Menurut penulis, kesepakatan yang harus dilakukan dalam *e-commerce* yaitu dengan melakukan kesadaran antara pihak pelaku usaha dan konsumen untuk saling mengikatkan diri. Pihak konsumen menyetujui perjanjian yang sudah disediakan oleh

pelaku usaha. Suatu kesepakatan terjadi ketika calon pembeli telah menekan tombol buat pesanan dan telah melakukan pembayaran sebagai tanda persetujuan apabila konsumen telah menyetujui dan paham mengenai suatu produk yang dijual oleh penjual. Dari penjelasan tersebut apabila konsumen telah menyetujui perjanjian itu, maka telah terjadi transaksi diantara penjual serta pembeli. Para pihak yang melakukan perjanjian menyatakan kesepakatannya ketika konsumen sudah menyetujui syarat serta aturan yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal itu ketika konsumen telah mengisi form data diri bahwa pembeli telah sepakat dengan apa yang disyaratkan. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan bahwa kecakapan mengenai hal itu yaitu pelaku usaha dan konsumen sudah dikatakan cukup umur oleh hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang sudah cukup berumur dua puluh satu tahun, telah ataupun pernah menikah. Cakap bisa diartikan seseorang yang telah cukup umur, sehat akal pikiran, serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan guna melaksanakan tindakan tertentu. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengatakan bahwa seseorang yang tidak cakap yaitu seseorang yang belum dewasa serta berada di bawah pengampuan. Pada jual beli dengan *e-commerce* sulit menentukan apakah pelaku usaha dan konsumen sudah cakap dalam membuat perikatan sebab unsur penawaran serta unsur penerimaan dengan media elektronik dimana penjual serta pembeli tidak bertatap muka dengan langsung, meskipun syarat kecakapan berdasarkan KUHPerdata belum terpenuhi, hal itu tidak membuat perjanjian menjadi tak sah, namun hanya memberikan akibat pada perjanjian itu bisa dimintakan pembatalan oleh salah satu orang yang merasa dirugikan terhadap kecakapan seseorang, disebabkan kecakapan guna membuat perikatan termasuk syarat subyektif. Menurut penulis, seseorang yang terlibat dalam *e-commerce* yakni penjual, pembeli, dan jasa pengiriman. Penjual yaitu seseorang yang menjual suatu produk kepada konsumen, sedangkan pembeli yaitu seseorang yang hendak mendapatkan produk barang atau jasa melalui transaksi *e-commerce*. Sedangkan jasa pengiriman yaitu pihak yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang bertugas mengirimkan barang dari penjual kepada konsumen. Dari penjelasan tersebut bahwa pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan transaksi melalui *e-commerce* sudah sesuai dengan pasal 1329 dan pasal 1330 KUHPerdata. Mengenai suatu hal tertentu bahwa dalam membuat suatu perjanjian suatu hal yang diperjanjikan wajib objeknya jelas sehingga hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen dapat

ditetapkan. Misalnya jual beli kerudung, jual beli itu harus jelas, yaitu menjelaskan obyek benda agar konsumen mengetahui barang yang akan dibeli sudah jelas bentuknya, ukurannya, warnanya. Berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa *“Hanya barang-barang yang bisa dijual belikan saja bisa menjadi pokok suatu perjanjian”*. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan perdagangan melalui *e-commerce* telah sesuai dengan isi pasal 1332 KUHPerdata yakni hanya melakukan jual beli dengan barang-barang yang bisa diperdagangkan dan tidak dilarang oleh negara. Misalnya jual beli ginjal tidak boleh dilakukan karna tidak termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Sedangkan menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan *“Perjanjian wajib memiliki sebagai pokok suatu objek yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi suatu halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah tersebut terkemudian bisa ditentukan/dihitung”*. Selain itu menurut penulis, para pihak yang melaksanakan jual beli melalui *e-commerce* telah sesuai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan *“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari bisa menjadi pokok perjanjian”*. Dalam melaksanakan perdagangan melalui media internet seorang konsumen akan menunggu barang yang telah dibeli dari situs jual beli online yang dipilihnya dikemudian hari setelah pembeli melakukan pembayaran, sehingga objek jual beli itu tetap bisa menjadi pokok suatu persetujuan antara penjual dan pembeli. Suatu sebab yang halal maksudnya yakni perjanjian wajib atas sebab yang halal tak bertentangan terhadap ketertiban umum, tak bertentangan terhadap kesusilaan serta tak bertentangan terhadap UU (pasal 1337 KUHPerdata). Syarat sebab yang halal berfungsi mengukur keabsahan sebuah perjanjian yang ketentuannya berada di pasal 1320 ke empat KUHPerdata. Penafsiran sebab yang halal selalu berdasarkan ketentuan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Sesuatu sebab disebut dilarang apabila bertentangan terhadap UU, kesusilaan serta ketertiban umum. Sebagai contoh, tidak terpenuhinya rumusan Pasal 31 ayat (1) UU No 24 Tahun 2009 dikelompokkan dalam suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang. Maka dari itu, tidak dipakainya bahasa Indonesia terhadap suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing bisa dijadikan alasan untuk salah satu pihak guna meminta perjanjian dinyatakan *“Batal Demi Hukum”*, karena suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dari semua penjelasan terkait pemenuhan syarat subjektif serta syarat objektif dalam jual beli dengan media internet, keseluruhan syarat harus dipenuhi sehingga apabila semua syarat telah terpenuhi semua, maka para pihak yang telah melaksanakan jual beli melalui *e-commerce* sudah memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan menurut isi pasal 1338 KUHPdata jika seluruh perjanjian dibuat dengan sah berlaku sebagai UU terhadap para pihak yang membuatnya. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif jika tidak dipenuhi maka salah satu pihak bisa meminta pembatalan perjanjian yang sudah dibuat. Syarat ketiga serta keempat dinamakan syarat objektif apabila tak dipenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum.

Menurut penulis, terhadap pembahasan diatas, perjanjian *e-commerce* memakai dasar ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengaturannya, maka apa saja yang menjadi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan KUHPdata wajib diperhatikan supaya penerapan terhadap peraturan perjanjian di Indonesia yang secara umum memakai KUHPdata bisa diterapkan, dan perjanjian dalam *e-commerce* bisa diakui keabsahannya.

3.2 Itikad Baik Para Pihak Dalam Bertransaksi Melalui E-Commerce

Menurut penulis, itikad baik para pihak dalam bertransaksi melalui *e-commerce* bisa menerapkan beberapa hal, yaitu : Memberikan informasi yang pasti, Penjual memiliki kewajiban memberikan informasi terkait barang yang akan diperjual belikan oleh penjual kepada konsumen yang berhubungan dengan jual beli tersebut. Pelaku usaha dalam memberikan informasi tidak boleh mengarang dan wajib jelas. Strategi yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi yang jelas merupakan salah satu bentuk upaya agar menambah minat bagi konsumen sebab penjual sudah memberikan informasi yang cukup jelas dan bisa menjadi pertimbangan konsumen untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan konsumen. Sebagai contoh penjual bisa memperlihatkan testimoni dari konsumen lain yang bisa memberikan saksi terhadap barang yang dijual oleh penjual tersebut dengan hal itu konsumen bisa semakin percaya kepada penjual dan juga dalam jual beli melalui *e-commerce* penjual dapat memberikan ukuran suatu barang yang dijual misalnya celana yang berukuran XL (66 x 90 cm) XXL (68 x 100 cm) dan sebagainya. Identitas asli Penjual, Penjual memberikan identitas asli dalam melaksanakan perjanjian jual beli melalui media internet, hal tersebut dilaksanakan penjual karena transaksi jual beli melalui *e-commerce* tidak dilaksanakan

dengan bertemu langsung antara kedua pihak tetapi dilaksanakan dengan bertemu melalui media elektronik. Identitas asli dari penjual diperlukan apabila terjadi sesuatu terhadap barang yang diperjualkan melalui media elektronik. Identitas penjual juga diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dari penjual terhadap suatu barang yang dipesan oleh konsumen jika adanya cacat yang tersembunyi bisa dimintakan ganti rugi dan penjual wajib bersedia melaksanakan dengan itikad baik. Memberikan alamat lengkap, Bagi penjual maupun pembeli sebaiknya memberikan alamat yang lengkap supaya mempermudah dalam melakukan jual beli melalui *e-commerce*. Penjual bisa memberikan alamat dimana ia tinggal atau dimana lokasi tempat toko yang ia jual sehingga jika ada pembeli yang akan membeli suatu barang jelas mengetahui alamat dari si penjual. Sedangkan bagi konsumen juga sebaiknya memberikan alamat dimana ia tinggal dengan benar dan tepat karena jika pembeli sudah berniat membeli suatu produk yang ingin dipesan maka penjual akan melakukan pengiriman barang dan melakukan pengecekan biaya pengiriman serta penotalan produk itu. Apabila pembeli sudah setuju dengan harga yang telah ditotalkan si penjual maka sudah adanya kata sepakat diantara pelaku usaha dan konsumen sehingga pelaku usaha sudah melakukan itikad baik antara keduanya.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan pada isi pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang asas itikad, yang menjelaskan “*Perjanjian wajib dilakukan menggunakan itikad baik*”. Pelaku usaha serta konsumen saat melaksanakan transaksi jual-beli dengan menggunakan media internet diharuskan untuk beritikad baik pada waktu melakukan perdagangan jual-beli melalui *e-commerce*, itikad baik bisa dilihat dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Menurut Subekti itikad baik adalah salah satu sendi yang paling utama di hukum perjanjian.

Itikad baik sudah jelas terlihat bahwa hal itu merupakan aspek yang cukup penting dan wajib dimiliki kepada penjual dan pembeli dalam melaksanakan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli dengan *e-commerce*.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa : Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Perdata, Bahwa keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* perspektif hukum perdata

diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara mengenai perikatan. Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu wajib terpenuhinya ketentuan yang berada di pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri bahwa penjual serta pembeli yang membuat suatu perjanjian sudah setuju terkait hal-hal pokok yang diperjanjikan. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian menyatakan kesepakatannya ketika konsumen telah menyepakati syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal itu ketika konsumen telah mengisi form data diri bahwa pembeli telah sepakat dengan apa yang disyaratkan. Kecakapan guna membuat suatu perjanjian bahwa cakap terhadap hal tersebut yaitu penjual serta pembeli sudah dinyatakan cukup umur oleh hukum, yaitu berdasarkan KUHPerdara, pelaku usaha serta pembeli yang sudah cukup berumur dua puluh satu tahun, telah atau pernah menikah. Seseorang yang melakukan jual beli online harus sehat jasmani dan rohani meskipun pelaku usaha serta konsumen yang melaksanakan jual beli online tak bertatap muka dengan langsung. Terhadap hal tertentu bahwa dalam membuat suatu perjanjian suatu hal yang diperjanjikan wajib objeknya jelas sehingga hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen dapat ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan diatas, jual beli melalui media internet antara pelaku usaha serta konsumen bisa dikatakan sah dan telah terjadi hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yakni hak serta kewajiban diantara pelaku usaha serta pembeli. Cakap diantara pelaku usaha serta pembeli merupakan kunci agar jual beli melalui *e-commerce* sah serta berjalan dengan baik. Pelaksanaan jual beli melalui *e-commerce* menurut hukum positif Indonesia yang bersumber KUHPerdara yaitu sah sebab sudah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif, sehingga akibatnya

Dari pembahasan dan penjelasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : Untuk pelaku usaha dan konsumen yang melaksanakan perdagangan dengan jaringan internet wajib berhati-hati serta mengetahui apa yang sudah menjadi aturan dalam UU meliputi yaitu tanggung jawab penjual serta pembeli. Hal tersebut bisa mengurangi resiko adanya wanprestasi. Untuk Kementrian Perdagangan sebaiknya membuat lembaga khusus yang berguna sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap jual beli dengan media internet supaya dapat mengurangi segala bentuk kerugian yang terjadi akibat jual-beli melalui *e-commerce* dengan memberikan pengawasan kepada

penjual dan pembeli yang melaksanakan perdagangan dengan menggunakan media internet. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintah terhadap masyarakat tentang suatu langkah dan proses bertransaksi dengan menggunakan media internet, sehingga masyarakat paham serta melakukan transaksi dengan media internet sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saat melakukan proses transaksi *e-commerce*, apabila ada pengaduan dari setiap orang yang merasa dirugikan, diharapkan pemerintah bertindak secara profesional untuk membantu menyelesaikan. Sebagai penjual supaya tidak melakukan wanprestasi, maka sebaiknya memberikan pelayanan yang baik dan menjunjung itikad baik dalam melaksanakan proses perdagangan dengan menggunakan media internet untuk mendapatkan keberhasilan usaha. Sebagai calon pembeli diharapkan mengetahui tentang perdagangan dengan menggunakan media internet supaya menjadi supaya yang pintar dalam memilih suatu lapak penjualan online yang sudah terpercaya. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* perlu komunikasi dan itikad yang baik antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII.
- Harahap, M.Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio,J, 1992, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Ramli, Ahmad M, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

Widjaja, Gunawan., 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tri Wahyu, 2017, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol 8, No 2.